



Strategi Pertumbuhan Tidak Berimbang dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Lombok Utara 2025-2029

M. Ridho Rezkita¹, Lalu Mas Star Pilda², Maesa Rania Nur Zafira³, Maria Christiana⁴, Ketut Calvin Imanuel J. W.⁵, Muammar Zia Ulhaq⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram, 83115

Email : reedo.rezki14@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 04, 2025

Revised July 22, 2025

Accepted July 25, 2025

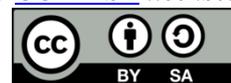
Keywords:

North Lombok Regency, Regional Development, Unbalanced Growth, Key Sectors, Linkages

ABSTRACT

As a newly established region still undergoing post-disaster recovery, North Lombok Regency (Kabupaten Lombok Utara, KLU) faces a range of development challenges, including limited fiscal capacity and a high incidence of extreme poverty. This study analyzes the regional development strategy outlined in the 2025–2029 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) using Albert O. Hirschman's theory of unbalanced growth. Employing a descriptive-analytic qualitative approach and supported by interviews with officials from the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the research finds that development efforts in KLU for the 2025–2029 period are centered on key sectors such as tourism, agriculture, and the creative economy. These sectors are expected to generate linkage effects that stimulate growth in related areas. The local government plays a central role as the driving force of development, primarily through the design and implementation of top-down strategic programs. While this strategy has the potential to generate focused and efficient sectoral growth, real challenges remain concerning the equitable distribution of benefits and the effectiveness of implementation at the field level. Consequently, the success of this strategy will depend heavily on sustained policy interventions and meaningful community involvement to prevent the entrenchment of long-term structural inequalities.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 04, 2025

Revised July 22, 2025

Accepted July 25, 2025

Kata Kunci:

Kabupaten Lombok Utara, Pembangunan Daerah, Pertumbuhan Tidak Berimbang, Sektor Unggulan, Linkages

ABSTRAK

Sebagai daerah pemekaran yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan fiskal hingga tingginya tingkat kemiskinan ekstrem. Penelitian ini menganalisis strategi pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029 dengan pendekatan teori pertumbuhan tidak berimbang dari Albert O. Hirschman. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitik dan wawancara dengan pihak Bappeda, penelitian ini menemukan bahwa pembangunan di KLU dalam periode 2025-2029 difokuskan pada sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif yang diharapkan mendorong efek berantai (*linkages*) ke sektor lain. Pemerintah daerah memainkan peran sentral sebagai penggerak pembangunan dengan merancang program-program strategis yang bersifat *top-down*. Meskipun strategi ini berpotensi menciptakan pertumbuhan sektoral yang terfokus dan efisien, tantangan nyata tentu tetap ada dalam hal pemerataan manfaat dan efektivitas implementasi



di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada keberlanjutan intervensi dan keterlibatan masyarakat lokal untuk menghindari terbentuknya ketimpangan struktural jangka panjang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

M. Ridho Rezkita

Universitas Mataram

E-mail: reedo.rezki14@gmail.com**PENDAHULUAN**

Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang merupakan daerah pemekaran dari Lombok Barat sejak 2008 menghadapi tantangan besar dalam pembangunan wilayah. Sebagai wilayah otonom yang terbilang relatif muda, KLU dihadapkan pada tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari rendahnya kapasitas fiskal, keterbatasan infrastruktur, hingga ketimpangan antarwilayah dan sektor. Selain itu, wilayah ini juga mengalami dampak signifikan akibat bencana gempa bumi pada tahun 2018 yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat (Kusuma Rahmanda, 2024). Akibatnya, KLU sempat menjadi salah satu daerah yang cenderung tertinggal di Provinsi NTB. Situasi ini tentu menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk memulihkan perekonomian daerah yang terdampak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Utara mencapai 25,93%, yang juga menempatkan daerah ini sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTB (BPS, 2024). Angka tersebut bahkan menjadi indikator bahwa sebagian besar keluarga di Kabupaten Lombok Utara masuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Sehingga, tak heran jika masalah kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah setempat hingga saat ini. Realitas ini menunjukkan bahwa pembangunan di KLU nyatanya belum mampu memberikan dampak yang merata bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang tepat dan terfokus menjadi sangat mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan pendekatan strategis berbasis sektor unggulan. Dalam Musrenbang yang digelar pada Mei 2025, pemerintah daerah menetapkan lima misi utama pembangunan, terutama upaya meningkatkan kemandirian ekonomi melalui sektor pariwisata, agraris, dan UMKM (Jaharuddin, 2025). Fokus terhadap sektor-sektor ini tidak hanya mencerminkan potensi lokal KLU yang kaya akan destinasi alam dan hasil bumi, tetapi juga menjadi upaya konkrit untuk mengejar ketertinggalan pembangunan melalui efek pertumbuhan yang dipicu dari sektor-sektor prioritas. Akan tetapi, RPJMD ini tidak semata-mata bertumpu untuk mengandalkan ketiga sektor tersebut, melainkan juga menekankan pentingnya dukungan dalam upaya penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Dalam forum Musrenbang, Wakil Bupati KLU menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pijakan strategis untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat sektor unggulan, dan mempercepat pertumbuhan



ekonomi (Lombokvibes, 2025). Semangat ini juga dibangkitkan dengan adanya capaian penurunan angka kemiskinan dari 43,12% pada 2008 menjadi 23,96% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya tren positif yang dirasakan oleh Kabupaten Lombok Utara, meskipun tantangan yang dihadapi cenderung masih besar.

Dalam konteks RPJMD 2025–2029, dapat dipahami bahwa KLU memilih fokus pembangunan pada sektor pariwisata, dengan dukungan dari sektor pertanian dan perikanan, serta penguatan sumber daya manusia. Strategi ini secara implisit mencerminkan pendekatan pertumbuhan tidak berimbang (*unbalanced growth*) sebagaimana dikemukakan oleh Albert O. Hirschman. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak dilakukan secara seragam di seluruh sektor atau wilayah, melainkan difokuskan pada sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan kemampuan untuk menciptakan efek penyebaran ke sektor lain. Pendekatan ini sejatinya juga tercermin dalam visi pembangunan KLU 2025–2029, yaitu “Bersatu untuk Kabupaten Lombok Utara yang Semakin Maju,” yang menekankan inklusivitas, keberlanjutan, dan daya saing daerah. Meski demikian, efektivitas dari strategi pertumbuhan tidak berimbang ini menjadi sebuah pertanyaan bagi penulis. Hal ini dikarenakan dokumen RPJMD baru disahkan pada Mei 2025, sehingga sebagian besar program tentu masih berada dalam tahap awal implementasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis strategi pembangunan KLU dalam RPJMD 2025–2029 melalui pendekatan teori pertumbuhan tidak berimbang Hirschman, guna melihat sejauh mana strategi tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektoral yang inklusif dan berkelanjutan di daerah pasca pemekaran ini. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah **“Bagaimana strategi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara 2025–2029 mencerminkan pendekatan pertumbuhan tidak berimbang, dan apa implikasinya terhadap efektivitas pembangunan wilayah?”**. Rumusan masalah ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji sejauh mana strategi pertumbuhan tidak berimbang ini mampu menjawab tantangan struktural dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di KLU.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memahami dinamika pembangunan daerah, khususnya dalam konteks Kabupaten Lombok Utara yang sedang berupaya membangun kembali struktur ekonominya melalui sektor pariwisata dan potensi lokal lainnya, perlu dilakukan penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu. Tinjauan ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis bagi analisis yang akan dilakukan, tetapi juga membantu mengidentifikasi pendekatan, strategi, serta kendala yang telah dikaji dalam berbagai konteks pembangunan serupa.

Sebagai awalan, Abd Hannan dkk. (2020) dalam penelitiannya berjudul *“Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Berkelanjutan Melalui Konsep Kearifan Lokal”* menekankan pentingnya konsep ekowisata sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan budaya lokal. Penelitian ini menyoroti bahwa praktik pariwisata yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi sering kali mengabaikan nilai-nilai sosial dan ekologis (Hannan & Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, pendekatan ekowisata berbasis kearifan lokal dinilai lebih tepat untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang kaya akan potensi alam dan budaya. Nilai-nilai lokal yang berakar pada keselarasan dengan alam dianggap sebagai modal sosial utama dalam strategi ini.



Selanjutnya, Eki Furqon dkk. (2023) dalam artikel “*Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah*” menyoroti pentingnya pembangunan dimulai dari tingkat desa sebagai bagian dari penguatan sistem otonomi daerah. Penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan (Furqon et al., 2023). Namun, Eki juga menemukan kendala dalam implementasi, seperti rendahnya partisipasi publik dan dominasi intervensi pusat. Temuan ini menegaskan perlunya desain perencanaan pembangunan yang benar-benar berbasis akar rumput untuk memastikan inklusivitas yang merata.

Kemudian, Mahendra dkk. (2021) dalam studinya yang berjudul “*Penguatan Ekonomi Masyarakat Pasca Gempa Bumi Berbasis Desa Wisata Dusun Tanaq Song Lauq, Kabupaten Lombok Utara*” secara spesifik membahas upaya pemulihan ekonomi pasca-bencana melalui pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Strategi yang digunakan mencakup penguatan sektor perikanan, edukasi wisata bahari, dan pelibatan masyarakat melalui Pokdarwis. Selain itu, Mahendra juga menekankan pentingnya integrasi antara pengembangan pariwisata dan mitigasi bencana dalam satu kerangka keberlanjutan (Mahendra et al., 2021). Studi ini menjadi relevan karena menawarkan model awal pembangunan berbasis desa di Kabupaten Lombok Utara, namun cakupannya masih terbatas pada satu dusun dan belum mengkaji dimensi spasial atau keterkaitan antarsektor secara menyeluruh.

Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, Olilingo dkk. (2023) melalui penelitiannya yang berjudul “*Kualitas Perencanaan Sektoral dan Perencanaan Wilayah Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah*” menunjukkan bahwa pendekatan sektoral semata tidak cukup efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan (Olilingo et al., 2023). Penelitian ini mengusulkan model perencanaan berbasis wilayah dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru (*multipolar growth poles*) yang tersebar secara spasial. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan antarwilayah dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata. Temuan ini memberikan pijakan teoritis penting dalam merumuskan strategi pembangunan di daerah seperti Lombok Utara, yang memiliki kesenjangan spasial antar kecamatan pasca-bencana.

Sementara itu, pendekatan ekonomi lokal melalui pariwisata juga diangkat dalam penelitian Rojaul Huda (2020) yang berjudul “*Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga*”. Studi ini mengidentifikasi enam elemen utama dalam strategi *Local Economic Development* (LED), termasuk pemanfaatan sumber daya lokal, inovasi, kolaborasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata desa secara terstruktur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Huda, 2020). Namun, strategi ini masih membutuhkan keterlibatan yang lebih kuat dari sektor swasta untuk meningkatkan dampaknya secara ekonomi.

Terakhir, Ginting dkk. (2025) dalam penelitian “*Pariwisata Belanja Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Lokal: Studi pada Pasar Buah Berastagi*” menunjukkan bahwa pasar tradisional bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika dikelola sebagai destinasi wisata belanja. Temuan mereka menunjukkan bahwa interaksi antara wisatawan dan pelaku ekonomi lokal mampu menciptakan peluang usaha baru, namun juga memunculkan tantangan, seperti distribusi keuntungan yang timpang dan tekanan terhadap lingkungan



(Ginting et al., 2025). Penelitian ini menyoroti pentingnya manajemen yang inklusif dan berwawasan lingkungan untuk menjamin adanya keberlanjutan.

Dari penelusuran berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah kontribusi penting terhadap pemahaman tentang pembangunan daerah berbasis pariwisata dan potensi lokal. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak disentuh. Salah satunya adalah kebutuhan akan kerangka strategis pembangunan daerah yang mengintegrasikan potensi sektoral, seperti pariwisata dan perikanan – dengan pendekatan spasial dan kelembagaan secara simultan. Terlebih lagi, dalam konteks Kabupaten Lombok Utara yang masih berada dalam proses pemulihan pasca-bencana dan menghadapi ketimpangan pembangunan antar wilayah, studi yang menggabungkan pendekatan *linkage* antar sektor, perencanaan wilayah, dan pemberdayaan lokal secara terintegratif menjadi sangat krusial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman secara mendalam terhadap fenomena pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Utara (KLU), khususnya dalam konteks pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal. Pendekatan ini dinilai tepat karena memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial, kelembagaan, serta kebijakan pembangunan secara kontekstual dan interpretatif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2020), penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada pencarian makna, pemahaman terhadap perilaku, serta interpretasi atas realitas sosial melalui lensa pengalaman dan nilai-nilai lokal (Harahap, 2020). Pendekatan ini tidak memperlakukan objek penelitian sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai fenomena yang berkembang dan kompleks. Senada dengan itu, Nasution (2023) menekankan bahwa pendekatan kualitatif merupakan sesuatu yang bersifat holistik. Artinya, pendekatan ini melihat setiap aspek sosial sebagai bagian dari satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan (Nasution, 2023). Dengan begitu, dalam konteks Kabupaten Lombok Utara, strategi pembangunan daerah tentu tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis dan struktur sosial.

Harahap (2020) mengklasifikasikan penelitian kualitatif menjadi dua pendekatan utama, yaitu deskriptif-analitik (*thick description*) dan deskriptif-eksplanatif. Tulisan ini memilih pendekatan deskriptif-analitik, yang menekankan pada penggambaran fenomena secara rinci dan mendalam, disertai dengan interpretasi terhadap makna yang tersembunyi di baliknya. Dengan pendekatan ini, tulisan ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pembangunan yang sedang berlangsung di Lombok Utara, tetapi juga menafsirkan bagaimana aktor lokal memahami, merespons, dan mengelola pembangunan sesuai konteks dan nilai-nilai sosial yang mereka anut.

Dalam rangka memperoleh data yang mendalam dan kontekstual, pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Utara, yang memberikan informasi langsung terkait arah kebijakan, tantangan teknokratis, serta strategi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang di wilayah tersebut. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan format semi-terstruktur, yang memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali topik-topik kunci secara lebih



terbuka dan kontekstual. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan melalui telaah dokumen berupa artikel jurnal akademik, laporan penelitian, publikasi pemerintah, serta pemberitaan media massa yang relevan dengan tema pembangunan daerah dan kebijakan sektoral di KLU. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkaya dan mengontekstualisasikan hasil wawancara, serta membandingkan temuan lapangan dengan kerangka konseptual dan praktik yang telah dikaji dalam studi-studi terdahulu.

KERANGKA PEMIKIRAN

Teori Pertumbuhan Tidak Berimbang

Teori pertumbuhan tidak berimbang pertama kali dikembangkan oleh Albert O. Hirschman dalam bukunya *The Strategy of Economic Development* (1958). Hirschman menolak pendekatan pertumbuhan berimbang yang menekankan investasi simultan di berbagai sektor. Menurutnya, pendekatan seperti itu terlalu menuntut ketersediaan sumber daya (terutama kapasitas manajerial dan institusi) yang justru langka di negara-negara berkembang. Padahal, pembangunan pada hakikatnya merupakan proses yang penuh dengan ketidakseimbangan atau disequilibrium (Wijayanti, 2002).

Berangkat dari penolakan terhadap pertumbuhan berimbang tersebut, Hirschman menawarkan alternatif berupa strategi pertumbuhan tidak berimbang, yakni pembangunan ekonomi melalui investasi yang disengaja dan terfokus pada sektor-sektor kunci. Sektor kunci yang dipilih adalah sektor yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dampak berantai atau efek keterkaitan (*linkages*) yang tinggi terhadap sektor lainnya. Bagi Hirschman, dengan menciptakan ketidakseimbangan pembangunan yang terstruktur, negara justru dapat memicu respons investasi dari sektor-sektor terkait, sehingga menciptakan dinamika pertumbuhan ekonomi secara lebih efektif. Dalam kerangka Hirschman, terdapat dua jenis efek keterkaitan utama, yakni *Backward Linkages* atau keterkaitan ke hulu dan *Forward Linkages* atau keterkaitan ke hilir (Holz, 2007).

Backward Linkages merupakan sebuah konsep keterhubungan yang menggambarkan sejauh mana sebuah sektor membutuhkan input dari sektor lain. Asumsinya adalah jika sebuah sektor berkembang dan permintaan inputnya meningkat, maka sektor-sektor penyedia input (ke hulu) juga akan ikut tumbuh. Contohnya, pengembangan industri tekstil akan mendorong industri pemintalan dan pewarnaan. Sebaliknya, konsep *forward linkages* menggambarkan sejauh mana output dari suatu sektor digunakan sebagai input oleh sektor lain. Misalnya, produksi bahan baku kimia akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian (melalui pupuk) atau manufaktur (melalui bahan sintesis). Sehingga, dengan fokus pada sektor yang memiliki linkage tinggi, pemerintah dapat menciptakan "*supply bottlenecks*" atau situasi ketika permintaan suatu barang atau jasa meningkat pesat, tapi pasokannya belum mencukupi. Hal ini nantinya akan mendorong pasar merespons dengan investasi pada sektor-sektor yang belum berkembang, sehingga menciptakan pertumbuhan berantai atau *spiral growth*.

Dengan demikian, yang coba ditekankan oleh Hirschman adalah pemerintah tidak harus berperan pasif dalam menyediakan prasarana atau *Social Overhead Capital* (SOC). Dengan kata lain, pemerintah seharusnya lebih aktif dalam berinvestasi langsung pada sektor-sektor produktif atau disebut juga *Directly Productive Activities* (DPA) yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui efek keterkaitan. Sehingga, penerapan teori pertumbuhan tidak berimbang menjadi relevan ketika dihadapkan pada konteks keterbatasan fiskal, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia seperti yang dialami oleh daerah-daerah berkembang,



termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kondisi ekonomi KLU yang relatif tertinggal pasca pemekaran dan bencana alam tentu akan mempersulit realisasi strategi pembangunan yang sifatnya menyebar secara merata. Dengan mengidentifikasi sektor-sektor kunci berdasarkan analisis keterkaitan antarsektor di Lombok Utara, maka strategi pembangunan dapat difokuskan secara selektif – sejalan dengan prinsip pertumbuhan tidak berimbang Albert O. Hirschman. Hal ini akan menjadi dasar bagi analisis pada bagian pembahasan berikutnya yang akan mengulas bagaimana implementasi teori ini dapat diterapkan secara konkret dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pembangunan Kabupaten Lombok Utara (Klu) 2025–2029

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangatlah bergantung pada proses perencanaan yang matang dan terukur. Dengan menerapkan strategi yang tepat, maka penanganan terhadap potensi kegagalan atau kelemahan dari perencanaan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga hasil dari proses pembangunan nantinya dapat diproyeksikan. Dengan demikian, eksistensi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi sangat krusial untuk memetakan alur pembangunan pada suatu daerah, tak terkecuali di Kabupaten Lombok Utara.

Pada Mei 2025 lalu, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Gatot Sugihartono, S.T, mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk membahas RPJMD 2025-2029. Musrenbang tersebut dihadiri oleh kurang lebih 300 orang, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara dan segenap perangkat pemerintahan lainnya. Dalam prosesnya, penyelenggaraan Musrenbang RPJMD KLU berangkat dari adanya upaya penyesuaian visi antara RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan sinkronisasi antara visi nasional dengan misi pembangunan di KLU (Jaharuddin, 2025). Sehingga, upaya mewujudkan visi tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam lima misi, yakni:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Religius dan Berbudaya.
- 2) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Pariwisata, Agraris dan UMKM.
- 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Melayani.
- 4) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Berperspektif Kebencanaan dan Berwawasan Lingkungan.
- 5) Meningkatkan Integrasi Perspektif Gender dalam Pembangunan.

Setelah merumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai arah kebijakan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lombok Utara, langkah selanjutnya yang diambil oleh Bappeda KLU adalah pengimplementasian program-program strategis yang akan menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan pembangunan. Program-program strategis ini bukan hanya sekadar daftar kegiatan, melainkan merupakan sebuah bentuk konkret dari penjabaran misi pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, program-program tersebut diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta untuk merespons isu-isu strategis yang berkembang di daerah. Artinya, setiap program dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung arah pembangunan Indonesia secara makro dan mendukung sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.



Program strategis ini juga merupakan representasi dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam menjawab tantangan pembangunan. Hal ini juga termasuk langkah penting dalam memanfaatkan potensi unggulan daerah, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program-program ini dirumuskan secara komprehensif dan integratif dalam satu kerangka pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Sebagai tindak lanjut, upaya ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan program kerja strategis dan didukung oleh proyek-proyek prioritas. Adapun program strategis atau program unggulan daerah Kabupaten Lombok Utara yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut.

1) KLU CERIA (Lombok Utara Cerdas, Sehat, Religius, dan Beretika)

Program ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan. Selain itu, nilai-nilai religiusitas dan etika juga dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan karakter masyarakat. Program ini selaras dengan Program Unggulan Provinsi NTB, yaitu NTB Sehat dan Cerdas, yang mengedepankan manusia sebagai pusat pembangunan.

2) KLU MEKAR (Menggerakkan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Agraris)

Berbeda dari program sebelumnya, program ini ditujukan untuk mendorong sektor unggulan daerah seperti ekonomi kreatif, pertanian, dan pariwisata agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini juga mencerminkan komitmen untuk memberdayakan desa dan memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Hal ini senada dengan program provinsi seperti Desa Berdaya, NTB Agromaritim, NTB Pariwisata Berkualitas, dan E-Mania. Program ini menjadi strategi utama yang dicanangkan KLU untuk mendorong daya saing ekonomi daerah.

3) KLU BERANI (Lombok Utara Bersih, Transparan, dan Melayani)

Fokus dari program ini terletak pada tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Ini merupakan implementasi dari semangat NTB Good and Smart Governance yang menjadi arah pembaruan birokrasi di tingkat provinsi.

4) KLU MEMBANGUN

Program selanjutnya yang menjadi fokus utama adalah KLU Membangun. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui pembangunan fisik yang merata dan terencana, Lombok Utara diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat konektivitas daerah terpencil. Selaras dengan program NTB Lestari Berkelanjutan dan NTB Connected, program ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

5) KLU SETARA (Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia)

Program ini menjadi program yang sangat krusial dalam rencana pembangunan Lombok Utara. Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah KLU untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat – termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya – memperoleh akses dan perlakuan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan. Ini juga menjadi dukungan langsung terhadap program NTB Inklusif yang mengedepankan keberagaman dan kesetaraan dalam pembangunan.



Program-program strategis tersebut nantinya akan didukung oleh 30 proyek strategis lainnya. Proyek-proyek ini merupakan manifestasi nyata dari visi pembangunan daerah dan ditujukan untuk memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dengan pelaksanaan program strategis dan proyek-proyek prioritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimis bahwa visi dan misi pembangunan dapat diwujudkan secara bertahap namun pasti. Koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi kunci dalam menggerakkan seluruh agenda pembangunan demi terciptanya Lombok Utara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Teori Pertumbuhan Tidak Berimbang Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Lombok Utara

Pendekatan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan karakteristik yang selaras dengan teori pertumbuhan tidak berimbang (*unbalanced growth*) yang dikembangkan oleh Albert O. Hirschman. Teori ini berpandangan bahwa pembangunan tidak harus dimulai secara serentak di semua sektor atau wilayah, melainkan dilakukan secara selektif pada sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi besar dan daya dorong kuat terhadap pertumbuhan di sektor-sektor lainnya. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan ketimpangan awal yang direncanakan secara strategis agar dapat memicu efek pengganda dan efek sambungan (*linkages*) ke sektor atau wilayah lain. Dalam konteks ini, pembangunan tidak berimbang di Kabupaten Lombok Utara tercermin dalam beberapa program dan proyek prioritas. Meskipun proyek dan program Pembangunan KLU sebenarnya sudah tercantum dalam RPJMD 2025-2029 – untuk memperkuat data analisis – penulis juga mengumpulkan informasi melalui wawancara langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Lombok Utara, Bapak I Wayan Suartana, S.ST., Pi., M.Si, pada 7 Mei 2025.

Dalam konteks KLU, fokus pembangunan diarahkan pada tiga sektor utama, yakni pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Ketiga sektor ini terakomodasi melalui program KLU MEKAR (Menggerakkan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Agraris). Pemerintah daerah secara eksplisit menempatkan tiga sektor ini sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, khususnya pariwisata. Sektor ini diakui sebagai sektor andalan yang diharapkan mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan kerangka Hirschman yang menekankan bahwa pertumbuhan harus dipicu oleh sektor-sektor dengan daya ungkit tinggi. Transformasi pariwisata dari *mass tourism* ke *quality tourism* di Gili Tramen, serta pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata seperti Rest Area Terpadu Teluk Nare, Youth Center, dan revitalisasi desa wisata, menunjukkan bahwa Pemkab KLU menjadikan sektor ini sebagai “*leading sector*” dalam strategi pembangunan. Sementara itu sektor agraris dan ekonomi kreatif juga tidak diabaikan, melainkan dijadikan komplementer atau pelengkap yang diharapkan ikut terdorong oleh pertumbuhan pariwisata (TanjungTV, 2025). Melalui rencana hilirisasi pertanian, pemerintah mencoba mendorong potensi dari hasil bumi untuk menaikkan nilai jual sebagai upaya lanjutan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat dan daerah.

Lebih lanjut, pembangunan di KLU semakin jelas memperlihatkan penerapan pendekatan tidak berimbang dalam proses pertumbuhannya. Konsentrasi pembangunan pada wilayah atau sektor tertentu, misalnya kawasan wisata, pusat perekonomian baru dan



pembangunan jalan Lingkar Utara merupakan cerminan dari strategi growth pole yang merupakan bagian utama dari pendekatan tidak berimbang (Jaharuddin, 2025). Pembangunan jalan lingkar dan pusat ekonomi baru bukan dimaksudkan untuk pemerataan langsung, melainkan lebih sebagai pusat pertumbuhan yang diharapkan memicu aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya. Kebijakan ini sesuai dengan logika trickle-down effect dalam pendekatan tidak berimbang, yaitu bahwa pertumbuhan yang terkonsentrasi akan "menetes" ke kelompok dan wilayah lainnya (Yeung, 2017). Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa meskipun belum semua masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah tetap berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui penyediaan sekolah rakyat, pelatihan tenaga kerja, serta bantuan alat dan pemasaran produk. Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam arus pertumbuhan ekonomi.

Strategi pembangunan Kabupaten Lombok Utara tampaknya juga dirancang dengan mempertimbangkan efek berantai (linkages), yang menjadi inti dari teori Hirschman. Pengembangan pada sektor pariwisata diharapkan memberikan dorongan bagi sektor lainnya, seperti pertanian melalui agrowisata, serta ekonomi kreatif lewat produk lokal dan kerajinan. Proyek seperti revitalisasi Rumah Pemotongan Hewan, agrowisata di Genggelang, serta pengembangan pasar dan rest area merupakan contoh nyata bagaimana linkages effect sedang diupayakan untuk menciptakan konektivitas antar sektor. Pemerintah daerah juga telah melakukan upaya konkret untuk memperkuat backward linkage melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK). Pemanfaatan BLK tersebut bertujuan untuk mempersiapkan SDM lokal agar dapat terserap ke dalam sektor pariwisata. Secara teoritik, langkah ini mencerminkan langkah pembangunan sektor unggulan yang mampu menarik serta memberdayakan sektor-sektor penunjang, termasuk tenaga kerja lokal (Handayani, 2025).

Namun demikian, meskipun strategi linkages mulai diterapkan, upaya tersebut tampaknya tidak serta merta akan menjawab tantangan pembangunan yang sesungguhnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan – meskipun tidak disebutkan secara eksplisit – penulis dapat melihat bahwa tantangan utama yang masih dihadapi oleh pemerintah KLU adalah belum ditemukannya cara yang lebih efektif agar masyarakat benar-benar dapat meningkatkan pendapatan melalui fasilitas yang telah dibangun. Hal ini tidak terlepas dari program-program yang sempat mangkrak pada pemerintahan sebelumnya. Sehingga, dapat dipahami bahwa efek riil dari strategi linkages terhadap kesejahteraan masyarakat belum terasa secara merata. Pembangunan sektor utama belum sepenuhnya menciptakan efek limpahan yang inklusif dan berkelanjutan. Inilah yang kemudian menjadi celah kritik terhadap penerapan teori ini di Kabupaten Lombok Utara, mengingat pertumbuhan yang diharapkan pada prosesnya tidak secara otomatis akan menyebar. Sehingga, tanpa adanya intervensi lanjutan, ketimpangan awal akan berisiko besar menjadi ketimpangan yang bersifat struktural.

Di sisi lain, sesuai dengan pandangan Hirschman mengenai pentingnya peran pemerintah sebagai agen pembangunan, pemerintah daerah KLU memegang peran sentral dalam menginisiasi berbagai proyek strategis. Peran ini tercermin dalam berbagai proyek strategis besar yang dibiayai dan dikelola oleh pemerintah daerah, mulai dari rencana pembangunan perguruan tinggi negeri, rumah sakit dan puskesmas di Bayan, pusat olahraga, Islamic Center, hingga proyek pengelolaan sampah dan air bersih (Devi Hamdayani, 2025). Tak hanya pembangunan fisik, peran pemerintah juga terlihat dalam pengembangan SDM



melalui program KLU CERIA, reformasi birokrasi lewat KLU BERANI, serta pembangunan infrastruktur melalui program KLU MEMBANGUN. Berbagai inisiatif ini menunjukkan adanya pendekatan top-down dalam pengelolaan pembangunan daerah, yang merupakan salah satu karakteristik utama dalam teori pertumbuhan tidak berimbang sebagaimana disampaikan oleh Hirschman.

Program dan proyek di atas merupakan refleksi nyata dari keseriusan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya-upaya di atas pada akhirnya dipusatkan dalam rangka pengentasan angka kemiskinan di KLU. Melalui upaya peningkatan kualitas fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur pada sektor-sektor kunci, pemerintah berharap agar angka kemiskinan dapat ditekan dan pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan yang tidak terjangkau. Menurut keterangan langsung dari Bapak I Wayan Suartana – pasca mengalami pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 – KLU mengalami lonjakan kemiskinan yang cukup tinggi, yakni sebesar 43,12% . Meskipun seiring berjalannya waktu angka tersebut mulai menurun menjadi 25%, pada tahun 2022 Kabupaten Lombok Utara mengalami fenomena kemiskinan ekstrem, dengan 1.045 keluarga yang terdampak. Sehingga, melalui RPJMD 2025-2029, pemerintah KLU berusaha untuk melakukan pembangunan yang inklusif dan partisipatif, guna menjamin pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Proyeksi Efektivitas Strategi Pertumbuhan Tidak Berimbang Di Kabupaten Lombok Utara

Pada gilirannya, strategi pertumbuhan tidak berimbang memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya menarik untuk diadopsi dalam konteks daerah berkembang seperti Kabupaten Lombok Utara. Salah satu keunggulannya adalah mengenai efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hirschman, pembangunan difokuskan terlebih dahulu pada sektor atau wilayah yang dianggap memiliki potensi terbesar sebagai motor pertumbuhan. Dengan demikian, alokasi anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah cenderung hanya diperuntukkan pada sektor-sektor kunci yang menjadi sasaran. Pemerintah dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang kuat, yang diharapkan mampu menimbulkan efek sambungan (linkages) ke sektor dan wilayah lain di sekitarnya. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong investasi yang lebih terarah dan memaksimalkan dampak pembangunan melalui sektor-sektor unggulan yang sudah memiliki daya saing atau peluang pasar. Ketika linkages berjalan dengan baik, maka hasil pembangunan dari sektor unggulan tersebut dapat menyebar ke sektor lain secara bertahap. Inilah yang kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Namun demikian, karena RPJMD 2025–2029 masih berada dalam tahap awal implementasi, efek sambungan yang diharapkan belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara, tantangan yang mulai tampak adalah bagaimana memastikan fasilitas dan proyek yang telah direncanakan benar-benar mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam penyediaan BLK untuk mendorong keterlibatan warga lokal dalam sektor pariwisata memang mencerminkan adanya arah kebijakan menuju linkages. Namun, keberhasilan dari strategi ini akan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan di lapangan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini sekaligus menguatkan salah



satu kritik terhadap teori pertumbuhan tidak berimbang, yakni ketimpangan awal harus diikuti dengan adanya intervensi lanjutan yang terencana agar tidak berubah menjadi ketimpangan permanen.

KESIMPULAN

Strategi pembangunan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam RPJMD 2025-2029 merupakan sebuah formula yang sangat esensial. Eksistensi RPJMD ini menjadi sangat penting dalam menentukan arah pembangunan KLU, terutama dalam menjawab seluruh tantangan sosial dan ekonomi. Dalam prosesnya, strategi ini juga menunjukkan penerapan pendekatan pertumbuhan tidak berimbang (unbalanced growth) yang dimaksudkan oleh Hirschman, dengan fokus utama pada sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Pendekatan ini dianggap tepat untuk daerah dengan keterbatasan fiskal dan sumber daya, karena memungkinkan investasi difokuskan pada sektor-sektor kunci yang memiliki potensi efek keterkaitan (linkages) terhadap sektor lain. Pemerintah daerah pun menunjukkan keseriusannya sebagai inisiator pembangunan melalui berbagai program strategis, seperti KLU MEKAR, KLU CERIA, KLU BERANI, KLU MEMBANGUN, dan KLU SETARA. Sembari diiringin dengan proyek-proyek prioritas, pemerintah KLU melalui Bappeda berusaha untuk memperkuat sektor-sektor unggulan dan memberdayakan masyarakat lokal. Efek berantai dari sektor pariwisata ke sektor pertanian, ekonomi kreatif, dan pengembangan SDM menjadi tujuan utama agar pertumbuhan dapat menyebar secara bertahap ke seluruh wilayah.

Strategi yang dicanangkan pemerintah memang terdengar sangat bagus secara teoritik. Pendekatan pertumbuhan tidak berimbang memiliki potensi besar untuk menjadi strategi yang adaptif untuk mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan di KLU. Namun, perlu diingat bahwa implementasi RPJMD ini masih berada pada tahap awal dan tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pembangunan sektor unggulan benar-benar menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Keterlibatan masyarakat lokal, efektivitas program pelatihan, serta sinergi lintas sektor dan pemerintahan menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan jangka panjang. Tanpa intervensi tambahan yang terarah, strategi ini justru berisiko menciptakan ketimpangan struktural baru yang kemungkinan besar tak terselesaikan hingga pemerintahan berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- BPS. (2024, December 9). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Utara, 2022. <https://lombokutarakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3NCMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-lombok-utara.html>
- Devi Hamdayani. (2025). Hendak Bangun Islamic Center, Pemda KLU Siap Relokasi Tiga Kantor OPD. <https://insidelombok.id/lombok-utara/hendak-bangun-islamic-center-pemda-klu-siap-relokasi-tiga-kantor-opd/>



- Furqon, E., Rayhan, A., & Febrian, H. (2023). Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 99–118.
- Ginting, J. E. B., Tobing, A. D. R., & Sidabutar, I. S. (2025). PARIWISATA BELANJA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT LOKAL:(Studi pada Pasar Buah Berastagi). *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, 3(1), 25–31.
- Handayani, D. (2025). Dorong Pendidikan Merata, SDM Unggul Jadi Prioritas KLU. <https://insidelombok.id/lombok-utara/dorong-pendidikan-merata-sdm-unggul-jadi-prioritas-klu/>
- Hannan, A., & Rahmawati, F. (2020). Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Pamekasan Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 97–120.
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif.
- Holz, C. (2007). The Unbalanced Growth Hypothesis and the Role of the State: The Case of China's State-Owned Enterprises. *Journal of Development Economics*, 96, 220–238. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.10.007>
- Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 157–170.
- Jaharuddin. (2025). Bappeda Kabupaten Lombok Utara Gelar Musrenbang RPJMD Tahun 2025 - 2029. [https://www.postkotantb.com/2025/05/bappeda-kabupaten-lombok-utara-gelar.html#:~:text=Lombok%20Utara%2C%20\(postkotantb.com,Selasa%206%20Mei%202025%20mengungkapkan.](https://www.postkotantb.com/2025/05/bappeda-kabupaten-lombok-utara-gelar.html#:~:text=Lombok%20Utara%2C%20(postkotantb.com,Selasa%206%20Mei%202025%20mengungkapkan.)
- Kusuma Rahmanda, S. (2024, May 15). Kilas Balik Gempa Lombok 2018: Rekor Gempa Paling Parah di Pulau Lombok. <https://www.tempo.co/lingkungan/kilas-balik-gempa-lombok-2018-rekor-gempa-paling-parah-di-pulau-lombok-58886>
- Lombokvibes. (2025, May 7). Musrenbang RPJMD 2025-2029: Lombok Utara Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif dan Berbasis Data. <https://lombokvibes.com/news/musrenbang-rpjmd-2025-2029-lombok-utara-tegaskan-komitmen-pembangunan-inklusif-dan-berbasis-data/>
- Mahendra, Y. I., Lestari, S. A. P., & Kurniawan, A. (2021). Penguatan Ekonomi Masyarakat Pasca Gempa Bumi Berbasis Desa Wisata Dusun Tanak Song Lauq, Kabupaten Lombok Utara. *Prosiding Seminar Nasional Planoeearth*, 2, 82–87.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Olilingo, F. Z., Dai Dai, S. I. S., & Santoso, I. R. (2023). Kualitas Perencanaan Sektor dan Perencanaan Wilayah Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah (Studi Kasus Provinsi Gorontalo). *Journal of Regional Economics Indonesia*, 4(2).
- TanjungTV. (2025). Pendapatan Daerah Lombok Utara Melambung, Sektor Pariwisata dan Pertanian Jadi Andalan. <https://tanjungtv.com/pendapatan-daerah-lombok-utara-melambung-sektor-pariwisata-dan-pertanian-jadi-andalan/>



Wijayanti, D. (2002). Melacak Pembuktian Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2).

Yeung, H. (2017). The Strategy of Economic Development. *Regional Studies*, 51, 1–2.
<https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1260251.18576>